

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Asmaniar guslena putri¹, Mukhlizul Hamdi²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Bung Hatta

Email: iput28642@gmail.com 1, mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id 2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian ini berfokus pada pengguna laporan keuangan di wilayah Kabupaten Kerinci. Populasi dalam penelitian mencakup pihak-pihak terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan, responden yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan masyarakat setempat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling (Convenience Sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas, meskipun dalam praktiknya di Kabupaten Kerinci tingkat aksesibilitasnya dinilai masih rendah karena belum dipublikasikan secara luas melalui situs web resmi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the impact of regional financial report presentation, accessibility, and the regional financial accounting system on the accountability of regional financial management in Kerinci Regency. The research method used was a quantitative approach with a descriptive approach. The research object focused on users of financial reports in Kerinci Regency. The population included parties involved in financial management and oversight, consisting of members of the Kerinci Regency Regional People's Representative Council (DPRD) and the local community, was selected. The sampling technique used was accidental sampling (convenience sampling). The research results indicate that the presentation of regional financial reports has a positive and significant impact on accountability in regional financial management. Accessibility of regional financial reports has a positive impact on accountability, although in practice in Kerinci Regency, the level of accessibility is considered low because it has not been widely published on the official website. The regional financial accounting system has a positive and significant impact on accountability in regional financial management.

Keywords: *Presentation of Financial Reports, Accessibility, Regional Financial Accounting System, Accountability in Regional Financial Management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Dalam konteks ini, penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 (IHPD). BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi laporan hasil pemeriksaan semester II badan pemeriksa keuangan, (2023) Dalam LHP BPK Nomor 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 karena terdapat realisasi pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa Persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan kelebihan pembayaran Belanja honorarium yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Honorarium Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp15,73 miliar dan Rp489,04 juta. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp1,31 miliar. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Honorarium Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp13,24 miliar dan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN telah mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.1/12148/Kedua tanggal 13 Juni 2023. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1,20 miliar dan telah menerbitkan Surat Edaran Pejabat Bupati Kerinci Nomor 900/192/IV/BPKPD2024 untuk meningkatkan pengendalian atas verifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.

Agar akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh

asset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki pemerintah Rizka, (2021). Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Kaomaneng, (2020).

KAJIAN LITERATUR

Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas adalah teori yang menjelaskan sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori tentang keagenan (*Agency Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Berle dan Means (1932), kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan kewajiban pihak yang terkait dalam suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Teori Keagenan (*Agency Theory*) sebagai acuan dalam memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban dari pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut Rosalin, (2011). Yusrianti, (2013) mengatakan hubungan antara riset teori agensi adalah pemerintah bertindak sebagai agen Pengelola pemerintahan harus menetapkan strategis khusus agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah dan harus diawasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyajikan laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik. Sebagian besar agen lebih “tertutup” dan cenderung tidak ingin mengambil risiko, namun memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi didalam laporan keuangan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan atau seluruh masyarakat Yusrianti, (2013).

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan memberi informasi kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna informasi. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi lainnya mengenai perusahaan Tjandrakirana, (2014). Sedangkan menurut perspektif publik, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat dan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan

informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah Ratmono, (2015) menyatakan bahwa teori sinyal dapat membantu pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam mengurangi asimetri informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal dan pengungkapan yang lebih lengkap.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas Nordiawan, (2010). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Indrie Avissha et al, (2024) Penelitian ini menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Guasmin et al, (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yuni Wira Santi et al, (2018) Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fauziyah et al, (2025) Hasil penelitian sebelumnya yang dikutip menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: diduga penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah.

Satria et al, (2024) meskipun fokusnya juga pada penyajian, penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui uji regresi linear berganda terhadap responden internal pemerintah.

Ayu M et al, (2024) menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai temuan konsisten di berbagai penelitian empiris terkini. Deni H et al, (2024) penelitian empiris pada unit pemerintah daerah menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah lokal, yang meskipun skala organisasinya lebih kecil tetap relevan sebagai bukti empiris konteks pemerintahan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: diduga aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

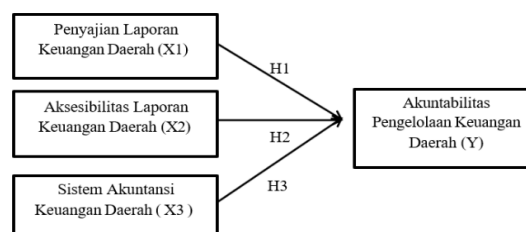
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 46 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 232 mengatakan bahwa “sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.” Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern.

Hasil Penelitian Palowa et al, (2025) Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan, akuntabilitas keuangan daerah juga meningkat. Agustinus W et al, (2024) penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas keuangan lokal melalui peningkatan keandalan pelaporan keuangan dan kepercayaan publik. Bambang S et al, (2025) Melalui kajian literatur empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa regional financial accounting system secara konsisten berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan bukti dari banyak penelitian nasional terkini. Aprilia (2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas. Berdasarkan uraian dan penjelasan- penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : diduga sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dapat digambarkan di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data primer dengan metode penyebaran kuisioner (skala likert 1-5). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2024, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* maka didapatkan responden sebanyak 100 orang, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji moderasi dengan bantuan program SPSS 25, dilengkapi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam studi ini memiliki peran untuk menyajikan informasi atau penjelasan mengenai data dengan menggunakan angka rata-rata (mean), varians, nilai maksimum, nilai minimum, serta deviasi standar dari sampel yang diambil. Statistik deskriptif terlihat dari tabel analisis deskriptif berikut.

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penyajian laporan keuangan	98	9	20	15,59	2,346
Aksesibilitas laporan keuangan	98	6	19	14,56	2,818
Sistem akuntansi keuangan	98	9	20	16,05	2,480
Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan	98	11	20	16,24	2,407
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 20

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuisioner tersebut Kurniasari dan Santoso (2021). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besar (df) = $98-2 = 96$, dan α 0,05 atau 5% maka menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,1956. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan indikator tersebut valid. Adapun hasil perhitungan uji validitas pada penelitian ini adalah:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Ket
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Y.1	0,763	0,1956	Valid
		Y.2	0,846	0,1956	Valid
		Y.3	0,815	0,1956	Valid
		Y.4	0,793	0,1956	Valid
2.	Penyajian Laporan Keuangan	X1.1	0,822	0,1956	Valid
		X1.2	0,873	0,1956	Valid
		X1.3	0,854	0,1956	Valid
		X1.4	0,847	0,1956	Valid
3.	Aksesibilitas Laporan Keuangan	X2.1	0,817	0,1956	Valid
		X2.2	0,764	0,1956	Valid
		X2.3	0,846	0,1956	Valid
		X2.4	0,781	0,1956	Valid
4.	Sistem Akuntansi Keuangan	X3.1	0,787	0,1956	Valid
		X3.2	0,837	0,1956	Valid
		X3.3	0,818	0,1956	Valid
		X3.4	0,887	0,1956	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dibandingkan dengan r tabel = 0,1966. Sehingga semua indikator dari variabel dependent maupun independent yang ada dalam penelitian ini adalah Valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk peneliti yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha. Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronback alpha	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	0.818	0.60	Reliabel
Penyajian laporan keuangan daerah (X1)	0.863	0.60	Reliabel
Aksesibilitas laporan keuangan (X2)	0.814	0.60	Reliabel
Sistem akuntansi keuangan daerah (X4)	1.120	0.60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas diatas, memperlihatkan bahwa indikator dari kualitas produk, persepsi harga, promosi dan keputusan pembelian reliabel sebagai alat ukur variabel, karena nilai cronbachs alpha variabel sebesar lebih besar (>) dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan dependent mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mamiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dengan melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K- S). Jika nilai signifikansi residual data lebih besar dari 0,05 maka mengindikasikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.59860419
	Absolute	.132
Most Extreme Differences	Positive	.132
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.296
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah, 2025

Dari tabel 4.8 diatas, data mampu terdistirbusi secara normal, asumsi ini dibuktikan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S) bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,070 atau lebih tinggi dari 0,05. Dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dibanding 0,05 maka data penelitian memenuhi syarat normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain, sehingga dapat dilakukan ke uji berikutnya. Model regresi yang baik adalah yang Hemoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas perlu dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Hasil uji glejser dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,101	,850		2,472	,015
Penyajian laporan keuangan (X1)	,072	,047	,162	1,507	,135
Asesibilitas laporan keuangan (X2)	-,020	,043	-,054	-,461	,646
Sistem akuntansi keuangan (X3)	-,107	,050	-,257	-2,151	,134

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada uji Glajser masing-masing variabel independent mempunyai nilai signifikan diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bila dengan uji Glajser penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengukur apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen) dalam persamaan regresi. Untuk menguji ada tidaknya gejala

multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Nilai cutoff yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Tabel 4.10
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penyajian laporan keuangan (X1)	,865	1,156
Asesibilitas laporan keuangan (X2)	,736	1,358
Sistem akuntansi keuangan (X3)	,699	1,431

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (Y)

Sumber : Data yang diolah, 2025

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan pada nilai tolerance masing- masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan dibawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada uji Glajser masing-masing variabel independent mempunyai nilai signifikan diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bila dengan uji Glajser penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial atau terpisah. Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05 terdapat pengaruh signifikan sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil output untuk uji statistik t dilihat dari tabel Coefficient :

Tabel 4.12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,659	1,360		1,220	,226
Penyajian laporan keuangan (X1)	,354	,076	,344	4,656	,000
Aksesibilitas laporan keuangan (X2)	,147	,069	,171	2,141	,035
Sistem akuntansi keuangan (X3)	,431	,080	,445	5,415	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (Y)

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2025

Dilihat dari tabel 4.12 diatas, masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t tabel 1,985 pada signifikansi 0,05. Dengan demikian diperoleh hasil :

1. Uji hipotesis Penyajian Laporan Keuangan (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $4,656 > t$ tabel 1,985 dengan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima yang artinya Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Uji hipotesis aksesibilitas laporan keuangan (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh t hitung sebesar $2,141 < t$ tabel 1,985 dengan hasil signifikan sebesar $0,035 > 0,05$. Dengan demikian H_2 ditolak yang artinya aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Uji hipotesis sistem akuntansi keuangan (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh t hitung sebesar $5,415 > t$ tabel 1,985 (nilai t tabel untuk $n = 100$ dan signifikansi 0,05) dengan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima yang artinya sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji Kelayakan Model (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk menguji kelayakan suatu model regresi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	313,679	3	104,560	39,636	.000 ^b
Residual	245,331	93	2,638		
Total	559,010	96			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem akuntansi keuangan (X3), Penyajian laporan keuangan (X1), Aksesibilitas laporan keuangan (X2)

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel 4.13 Berdasarkan hasil Uji F pada tabel diatas, menunjukkan nilai F hitung sebesar 39,636 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti dapat dikatakan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisiensi determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2), dan sistem akuntansi keuangan (X3) mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). koefisiensi determinasi ini ditunjukkan oleh besarnya Adjusted R Square (R^2). Bentuk regresinya sebagai berikut :

Tabel 4.14

Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 ^a	.561	.547	1,624

a. Predictors: (Constant), Sistem akuntansi keuangan (X3), Penyajian laporan keuangan (X1), Aksesibilitas laporan keuangan (X2)

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) yaitu sebesar 0,547 yang variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan memberi kontribusi pengaruh sebesar 54,7%. Sedangkan sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penyajian Laporan Keuangan Daerah: Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci. Penyusunan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi instrumen utama dalam mempertanggungjawabkan dana publik. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah: Kemudahan

publik dalam mengakses informasi keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Transparansi melalui keterbukaan informasi publik dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD): Penerapan SAKD terbukti berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas. Sistem yang baik memudahkan pengendalian aset, liabilitas, serta menyediakan informasi keuangan yang terbuka untuk perencanaan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, A., Kartini, T., & Martaseli, E. (2023). Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Intern dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Kecamatan Cikakak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15957- 15965.
- Antika, Z. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Doctoral dissertation). Universitas Negeri Jakarta.
- Anwar. (n.d.). Anggaran Terbatas untuk Pengembangan Sistem. Diakses dari jambi.kemenag.go.id.
- Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. (2023). Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 (IHP).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023.
- Baviga, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 211- 235.
- Indrihastuti, P., Indah, S., & Bili, G. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Bisman*. <https://doi.org/10.37112/bisman.v5i2.1983>
- Latif, A., & Mahmud, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati). *Business and Accounting Education Journal*, 3(2), 287-301.
- Molle, S. S., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 4(3).

- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: (Studi Pada DPRD Kota Surakarta). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4108-4112.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Priscilla, D., Taufik, T., & Al Azhar, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 180-190.
- Santoso, W., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2023). Pengaruh Good Governance, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 5.
- Sari, N., Dasila, R. A., & Sari, T. (2023). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Kota Palopo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 860-872.
- Satria, et al. (2024). Uji Regresi Linear Berganda terhadap Akuntabilitas Keuangan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (n.d.). Kurangnya Keterbukaan dan Transparansi. Diakses dari diskominfo.kalteng.go.id.
- Sumarni, S., Sjarlis, S., & Oktaviani, A. R. (2023). Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Cendekia Akademika Indonesia (CAI)*, 2(2), 225-239.
- Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357-1368.
- Tandibato, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi (Doctoral dissertation). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tatang, R. W. (n.d.). Masalah dalam Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah. Diakses dari pbj.kalbarprov.go.id.